



---

## **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka**

---

### **INFO PENULIS**

Dirna Ristiana  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Indonesia  
[naya97997@gmail.com](mailto:naya97997@gmail.com)

Arafat Mallapiseng  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Indonesia  
[\\*afatpascaunm@gmail.com](mailto:*afatpascaunm@gmail.com)

Yudi Agusman  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Indonesia  
[yudiagusmanusn@gmail.com](mailto:yudiagusmanusn@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Ristiana, D., Mallapiseng, A., & Agusman, Y. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3200-3208.

### **Abstrak**

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang tergolong penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Donggala kecamatan Wolo kabupaten Kolaka masih sangat minim terlihat dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi. Pada tahap pengambilan keputusan masyarakat masih kurang terlibat dalam kegiatan musrenbang desa bisa dilihat dari kurangnya yang hadir dan turut menyampaikan aspirasinya saat proses musrenbang desa. Pada tahap pelaksanaan pembangunan terdapat partisipasi masyarakat yaitu berupa sumbangan tenaga. Namun masih ada masyarakat yang tidak ikut terlibat karena urusan masing-masing. Pada tahap ketiga yaitu pemanfaatan hasil pembangunan, dimana pada tahap ini partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan merawat hasil pembangunan masih sangat minim karena didasari dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan hasil pembangunan masih sangat kurang. Sedangkan untuk tahap terakhir yaitu tahap evaluasi tidak terdapat partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Desa Donggala, Masyarakat, Partisipasi, Pembangunan

### Abstract

This article is the result of research classified as descriptive research using a qualitative approach. The data used is sourced from primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that community participation in the development in Donggala village, Wolo district, Kolaka regency is still very minimal, as seen from the stages of decision-making, implementation, utilization, and evaluation. In the decision-making stage, the community is still less involved in village musrenbang activities, as seen from the lack of attendance and participation in expressing their aspirations during the village musrenbang process. In the implementation stage of development, there is community participation in the form of voluntary labor. However, there are still members of the community who do not get involved due to their own affairs. In the third stage, which is the utilization of development results, community participation in utilizing and maintaining development results is still very minimal because it is based on the level of awareness of the community in maintaining environmental cleanliness and utilizing development results, which is still very lacking. Meanwhile, in the final stage, which is the evaluation stage, there is no community participation.

**Keywords:** Donggala Village, People, Participation, Development

### A. Pendahuluan.

Desa merupakan satuan atau wujud pemerintahan terendah dengan sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bermukim dalam suatu daerah tertentu. Desa mempunyai kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab keperluan seluruh masyarakat setempat. Desa memiliki hak melakukan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah kabupaten atau kota menyerahkan sepenuhnya kepada desa tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di setiap desa.

Desa mempunyai peran penting dalam melaksanakan perubahan yang maksimal. Desa merupakan bagian terpenting dari struktur pemerintah dalam mewujudkan kesuksesan program pemerintah pusat. Dalam hal ini desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat untuk lebih cepat menyampaikan informasi tentang program pemerintah. Desa berperan untuk melayani serta menata pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan desa. Seperti yang tercantum dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa tujuan utama pembangunan Desa ialah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya, tidak hanya itu dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Desa yakni dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.

Perencanaan pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan atau keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia, sehingga tidak menyulitkan penentuan suatu kegiatan. Menurut Waterson bahwa “pada hakikatnya, perencanaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terorganisasi, dan terus menerus memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.(Ismanudin, 2021).

Pembangunan yang baik akan terlaksana jika dimulai dengan perencanaan yang baik, sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu dalam proses perencanaan memerlukan peran serta masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. Pentingnya kegiatan musyawarah dalam sektiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan mengenai program-program pembangunan yang akan di laksana di desa.(Riyanti Samaun, Bala Bakri, 2022),

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di negara yang sedang berkembang sangatlah penting, tetapi faktanya partisipasi masyarakat dalam rangka proses perencanaan pembangunan masih sangatlah lemah, mulai dari aspek semangat, kesadaran maupun kemampuan individu. Dalam bukunya Kebijakan Publik “ teori dan praktik” dinyatakan bahwa salah satu prinsip yang harus hadir agar sebuah kebijakan atau program dapat berhasil dilaksanakan adalah prinsip

partisipasi publik (Arafat, 2023). Lemahnya semangat, dan kesadaran dipengaruhi oleh berbagai masalah, salah satunya keterbatasan yang dimiliki masyarakat, disamping itu lemahnya aspek kepemimpinan dalam suatu daerah dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Partisipasi masyarakat dalam melakukan musyawarah masyarakat akan dapat ikut ambil dalam menentukan suatu program pembangunan secara bersama dengan mewujudkan suatu kepentingan yang dapat dinikmati. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjahui keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan desa akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan, disamping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam bentuk rangkaian musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa (musrenbangdes), kecamatan (musrenbang kecamatan) dan kabupaten (musrenbang kabupaten). Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahun. Melalui musrenbang, masyarakat berpeluang menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh *Nasution* yang dengan tegas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan pembangunan merupakan faktor utama dalam *good governance* yang memberikan manfaat besar, di antaranya meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan, menjamin ketercapaian tujuan, menjamin keberlanjutan pembangunan. Selama dua tahun terakhir, Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka berhasil melaksanakan beberapa program pembangunan yaitu perbaikan jembatan, pembuka jalan usaha tani, penggunaan air bersih, dan pembanguna dreanse. Namun masih terdapat potensi pembangunan yang perlu dikembangkan seperti perbaikan jalan di dusun 5 desa donggala bagian pesisir pantai akses menuju desa Babarina danpembuangan sampah yang berada di pesisir pantai dusun 6.

Dalam penelitian Wahyuningsi (2019) mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, seperti kurangnya informasi, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya dukungan dari pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat untuk keberhasilan pembangunan, karena dapat meningkatkan rasa memiliki dantanggung jawab terhadap hasil pembangunan.

Dalam Musrenbang masyarakat Sering datang terlambat dan hanya sebagian kecil perwakilan masyarakat yang di undang sering ikut rapat menunjukkan bahwa masyarakat tidak bertanggung jawab dan tidak terlalu terlibat dalam proses pembanguan di desa. Fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat beleum sepenuhnya ikut serta dalam proses pembangunan. Terutama dalam hal pembangunan di setiap dusun, faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat yaitu kurangnya kesadaran akan peran mereka dalam proses pembangunan. Hal ini juga peneliti dapatkan di Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan temuan Peneliti, ada perbedaan antara keadaan yang terjadi di Desa Donggala kecamatan Wolo kabupaten Kolaka dengan kebijakan yang berlaku. Yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa mengemukakan bahwa harus ada partisipasi masyarakat baik itu berupa partisipasi buah pikiran, materi, maupun tenaga dalam proses pembangunan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 2 bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong

Peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembanguna, dimana masyarakat di desa Donggala dalam musrenbang masih kurang terlibat dalam proses pembangunan bisa dilihat dari keterlambatan saat kegiatan dan kurangnya masukan-masukan yang diberikan untuk program pembangunan kedepannya, serta ketidakcocokan antara sebagian masayakat dengan pemerintah desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan yang sudah di bangun seperti pembangunan penimbunan jalan, drenase dan perbaikan jembatan lintas dusun. Hal ini disebabkan karna kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mereka berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pemanfaatan, dan evaluasi. Ini adalah kondisi sosial yang menarik minat peneliti untuk meneliti Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

## B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mengacu pada metodologi yang digunakan untuk memahami fenomena manusia dari perspektif yang mendalam, kompleks, dan kontekstual (Harahap K. et.al., 2024). Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai Berikut : (1) Observasi atau pengamatan adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, (2) Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. (3) Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data melalui meliputi buku - buku yang relevan, peraturan - peraturan, laporan kegiatan, foto, film documenter, data yang relevan penelitian. (Safitri et al., 2025)

Setelah data terkumpul maka dilakukan validasi data guna memastikan bahwa semua data yang akan diolah telah memiliki sifat andal dan tepercaya serta jauh dari bias. Untuk itu teknik validasi yang digunakan adalah triangulasi. Penguatan (Triangulasi) adalah konsep dasar dalam metode penelitian campuran yang menekankan penggunaan berbagai sumber data, alat pengukuran, metode pengumpulan data, atau analisis yang berbeda untuk memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian. Menurut Flick dalam Wijaya et al., (2024), triangulasi adalah strategi penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konfirmasi dari temuan dengan mengumpulkan dan membandingkan data dari berbagai sumber atau pendekatan. Hal ini membantu dalam meminimalkan bias dan kesalahan interpretasi yang mungkin terjadi jika hanya menggunakan satu jenis data atau satu metode penelitian saja. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan prosedur kerja meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa merupakan aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu program atau proyek. Dalam konteks ini, partisipasi tidak hanya sekadar keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga mencakup peran aktif mereka dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi. Melalui partisipasi yang efektif, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih relevan dan sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai lokasi dan jenis infrastruktur yang dibutuhkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan, mereka cenderung lebih menghargai dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai program pembangunan berbasis masyarakat, seperti pembangunan jalan, drenase, atau fasilitas umum lainnya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong keberlanjutan pembangunan desa. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak

untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Berdasarkan hasil temuan peneliti tentang pembangunan di Desa Donggala sejak tahun 2023-2024, terdapat pepmbangunan yang di urai dalam tabel tersebut.

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi	Tahun	Anggaran(Rp)
1.	Drainase	Dusun III, VI ,I	2023- 2024	35.000.000
2.	Pemb. Jalan Usaha Tani	Dusun I	2023	151.062.400
3.	Deueker plat	Dusun IV	2024	14.100.000
4.	Rehab Jembatan Desa	Dusun V	2024	54.647.000

(Sumber: Desa Donggala, 2025)

Tabel di atas menunjukkan sejumlah pembangunan di Desa Donggala dari tahun 2023–2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun evaluasi diperlukan, memerlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan, tenaga, dan materi Namun, seiring berjalannya waktu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan data wawancara yang telah dikumpulkan oleh peneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Donggala, dengan beberapa indikator yang dievaluasi, yaitu melalui pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut;

### 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan melalui rencana pembangunan. Seperti keikutsertaan dalam menghadiri rapat pembangunan desa, memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa, memberikan informasi pada rapat pembangunan desa, dan juga ikut serta dalam proses pembuatan keputusan, Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi, (2019). Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari tiga hal yaitu; mekanisme pelaksanaan Musrembang desa, kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrembang, dan proses pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrembang desa.

#### a. Mekanisme pelaksanaan Musrembang desa Donggalas

Pada indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peneliti ingin melihat mekanisme kegiatan Musrenbang Desa dan sejauh mana masyarakat terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Proses perencanaan pembangunan desa dimulai dengan musyawarah Desa dan dilanjutkan ke musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat maupun aparat desa. Sebelum dilaksanakan Musrembang Desa, terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat desa, hal ini disampaikan oleh bapak JM<sup>29th</sup>. selaku Kaur Perencanaan Desa Donggala, yang dibenarkan oleh bapak M<sup>45th</sup>. sebagai Anggota BPD serta salah seorang masyarakat dusun III desa Donggala yaitu bapak I<sup>54th</sup> "...Sebelum dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-des) terlebih dahulu dilakukan kegiatan musyawarah desa (Musdes) yang dilaksanakan di kantor desa. Dalam proses Musdes ini masyarakat di undang untuk mengusulkan ide dan gagasannya. Setelah itu lanjut ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diadakan oleh BPD dan bekerjasama dengan Kepala Desa, disinilah masyarakat mempertahankan hasil kesepakatan mereka yang dihasilkan di Musdes. Hasil dari musrenbangdes kemudian diajukan nantinya di Kecamatan. Setelah itu dibuatlah yang namanya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)..."(Wawancara).

Dari hasil wawancara tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa sebelum dilaksanakan Musrembang desa oleh BPD maka terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah desa (Musdes) guna menampung dan menyepakati hal-hal yang akan diusulkan dalam Musrembang desa. Dalam kegiatan musyawarah desa inilah masyarakat mengusulkan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka serta permasalahan-permasalahan yang harus di tanggulangi oleh pemerintah desa melalui perencanaan pembangunan desa.

#### b. Kehadiran Masyarakat dalam Kegiatan Musrembang Desa.

Pada tahap ini peneliti hendak mengetahui sejauhmana kehadiran masyarakat desa Donggala dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Kehadiran masyarakat tentunya menjadi salah satu faktor penentu sebagai wujud partisipasi masyarakat desa Donggala dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Untuk itu peneliti mewawancarai Ibu KR<sup>25th</sup> selaku Sekretaris Desa Donggala, dan menyatakan sebagai berikut ".....Pada pelaksanaan musrembang

desa hanya beberapa masyarakat yang datang saja bisa di bilang tidak sampai 5 orang yang datang saat rapat..." (Wawancara). Kemudian dibenarkan oleh bapak AN<sup>50th</sup> selaku kepala dusun VI Desa Donggala sebagai berikut ".....Saat kegiatan Musrembang desa dilakukan memang masih banyak masyarakat yang tidak hadir ataupun terlambat karna masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya masing-masing. Apalagi masyarakat Desa Donggala berpikir ada atau tidaknya mereka pembangunan akan terlaksana" (Wawancara). Disisi lain seorang warga desa Donggala menyatakan bahwa ".....Betul kami diundang hanya saja jadwal kegiatan musrembang desa dengan pekerjaan kita sangat tidak tepat karena kami bekerja di pagi hari sedangkan rapat juga dilakukan pada pagi hari juga jadi jadwal kegiatan dan pekerjaan kami itu bertabrakan, makanya kami kadang datang terlambat atau tidak datang sama sekali..." (Wawancara).

Dari wawancara tersebut di atas didapatkan fakta bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam bentuk kehadiran dalam kegiatan. Ini disebabkan oleh waktu pelaksanaan musyawarah yang bertepatan dengan waktu mereka untuk mencari nafkah, selain itu ada anggapan masyarakat bahwa walaupun mereka tidak hadir, musyawarah yang diselenggarakan tetap akan berjalan. Kondisi ini menjadi faktor utama tidak tersampainya aspirasi, masalah, dan kebutuhan riil masyarakat yang memungkinkan rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat desa Donggala.

### **c. Proses Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa Donggala.**

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses yang peneliti ingin ketahui dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui musrenbang desa berupa partisipasi ide, gagasan, serta usulan. Seperti yang telah dipaparkan dalam indikator kehadiran masyarakat di kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di desa Donggala terbilang sangat kurang namun ada beberapa masyarakat yang tetap hadir dalam kegiatan tersebut yang peneliti ingin mengetahui gambaran bentuk partisipasi yang mereka lakukan. Berdasarkan hal tersebut dijelaskan oleh ibu ES<sup>27th</sup> selaku Kaur kesejahteraan Desa Donggala yaitu sebagai berikut ".....saat proses pelaksanaan musrenbangdes kami memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai ide, gagasan, dan usulan selama proses musyawarah. Dalam kegiatan ini, masyarakat umumnya mengungkapkan kebutuhan mereka, terutama dalam sektor infrastruktur. Misalnya, mereka mengusulkan pembangunan deker, drainase, atau perbaikan jalan untuk meningkatkan fasilitas di desa mereka..." (Wawancara). Kemudian disampaikan pula oleh ibu N 51<sup>th</sup> selaku masyarakat Dusun I Desa Donggala sebagai berikut ".....Dalam pelaksanaan Musrenbangdes, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide terkait perencanaan pembangunan. Namun, yang lebih banyak berbicara biasanya tokoh masyarakat dan kepala dusun, sebab kami merasa malu untuk mengungkapkan aspirasi secara langsung. Meskipun demikian, penjelasan mengenai anggaran selama Musrenbang desa sangat baik dan transparan, sehingga kami dapat memahami secara jelas penggunaan dana yang direncanakan" (Wawancara).

Dari wawancara tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa masyarakat yang hadir dalam kegiatan musyawarah di desa mengajukan usulan melalui para tokoh masyarakat dan para kepala dusun, masyarakat merasa enggan dan malu untuk langsung menyampaikan sendiri di depan forum musyawarah, namun secara substansinya bahwa dalam musyawarah di desa terkait dengan rencana pembangunan di desa Donggala mereka telah mengajukannya ke pemerintah desa. Secara umum ditinjau dari tiga aspek di atas dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan di desa Donggala sudah berjalan meskipun jumlah masyarakat yang hadir dalam musyawarah masih terbilang sedikit padahal keterlibatan masyarakat dalam memberi masukan, usul dan saran sangat penting.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Renaldi, 2023) dalam penelitiannya "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo". Yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur desa. Dalam penelitian tersebut, Renaldi (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan. Namun, Renaldi (2023) menemukan juga bahwa kendala partisipasi masyarakat sering kali muncul akibat rendahnya kesadaran, kurangnya informasi, atau terbatasnya akses masyarakat terhadap proses perencanaan.

## **2. Partisipasi dalam Pelaksanaan**

Setelah proses musyawarah perencanaan pembangunan selesai, langkah berikutnya adalah melaksanakan pembangunan. Indikator ini bertujuan untuk mengamati dan mengetahui sejauh mana keterlibatan seluruh warga yang tinggal di desa Donggala dalam pembangunan di desa.

Menurut oleh Cohen dan Uphoff (1977) dalam (Mulyadi, 2019) partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keterlibatan masyarakat didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan ini masyarakat bisa memberikan kontribusi yang lebih konkrit seperti kontribusi dengan tenaga, kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan.

Adapun RKP-Desa tahun 2025 yang sementara dilaksanakan di desa Donggala yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 RKP Desa Donggala Tahun 2025**

No	Pembangunan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Rabat Beton	Rp. 119.340.000	DD
2.	Talud	Rp. 192.514.000	DD
3.	Deuker	Rp. 23.000.000	DD

(Sumber: Desa Donggala, 2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rencana pembangunan di Desa Donggala pada tahun anggaran 2025 terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, adalah rabat beton yang mencakup pengerasan jalan, kedua, adalah embangunan Talud, dan yang ketiga pembangunan deuker, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 334.854.000, yang difokuskan pada dusun III, V, dan VI. Selain itu, terdapat tiga proyek pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu drainase dan deuker plat.

Pada bagian ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa Donggala terdapat dua proyek pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu drainase dan deuker plat. Pembangunan drenase dilaksanakan di dusun I, III, dan VI, sedangkan pembangunan deuker plat dilaksanakan di sunun IV. Disini peneliti hendak melihat seperti apa keterlibatan masyarakat desa Donggala pada saat pelaksanaan pembangunan di desa. Adapun bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa berupa tenaga, dalam konteks ini masyarakat sebagai tenaga pelaksana kegiatan ini, hal ini disampaikan oleh bapak MA<sup>30th</sup> selaku kepala dusun II desa Donggala yang dibenarkan oleh bapak R<sup>47th</sup> selaku masyarakat yaitu sebagai berikut “...bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu berupa tenaga. Adapun pembangunan untuk tahun ini masyarakat juga ikut andil yaitu rabat beton dan penimbunan jalan, dan perbaikan jembatan...” (Wawancara).

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis ditemukan bahwa pada pelaksanaan pembangunan drenase dan deuker plat terdapat partisipasi masyarakat berupa tenaga. Partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan tenaganya terbilang cukup baik meskipun masih ada masyarakat yang tidak datang karna terhambat oleh kurangnya informasi dan kesibukan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Ismatullah dan Gerry Katon Mahendra (2019) mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Kaligintung kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo, yang menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat paling menonjol juga terlihat dalam tahapan pelaksanaan, terutama melalui kontribusi tenaga. Dalam penelitian oleh Ismatullah dan Gerry Katon Mahendra (2019) menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat secara langsung.

### 3. Partisipasi Dalam Pemanfaatan.

Partisipasi dalam pemanfaatan adalah tahap ketiga dari pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam (Mulyadi, 2019), merupakan wujud dari peran masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi di desanya. Apakah keikutsertaannya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Terdapat beberapa fasilitas yang telah dibangun seperti, penimbunan jalan, drenase, dan fasilitas umum lainnya. Peneliti ingin melihat bagaimana masyarakat desa Donggala berperan dalam memanfaatkan hasil pembangun tersebut. Berdasarkan wawancara dengan ibu R<sup>47th</sup> dan ibu N<sup>53th</sup> selaku masyarakat menyatakan “...kami merasa sangat terbantu dengan adanya fasilitas yang dibangun. Seperti pembangunan dreanse dan deuker plat yang mengatasi genangan air saat hujan, inilah hal yang paling kami tunggu-tunggu untuk dibangun sehingga sekarang daerah kami tidak lagi tergenang setelah hujan...” (Wawancara).

Selanjutnya bapak BH<sup>55th</sup> selaku kepala kepala dusun I desa Donggala menyatakan “.....Meskipun pembangunan sudah terlaksana tetatpi masih banyak masyarakat yang tidak ikut merawat hasil pembangunan tersebut, bisa dibilang masih acuh terhadap hasil pembangunan. Karna masih ada masyarakat yang tidak merawat fasilitas yang ada, seperti membuang sampah di gorong-gorong sehingga ketika hujan air tersumbat” (Wawancara). Serupa yang diungkapkan

oleh bapak A<sup>25th</sup> selaku kepala dusun III desa Donggala yaitu sebagai berikut “.....Saya melihat bahwa masyarakat masih kurang peduli dengan hasil pembangunan, karna sering kali tidak digunakan dengan baik. Drenase yang ada juga sering kali tersumbat karena kurangnya perhatian dari masyarakat” (Wawancara).

Berdasarkan data hasil wawancara dari beberapa informan diatas serta pengamatan penulis, menunjukkan bahwa meskipun pembangunan terlaksana di desa Donggala, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan merawat hasil pembangunan masih sangat minim. Hal ini didasari dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan. Perlu menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mau bersama-sama menjaga dan merawat apa yang telah dibangun agar manfaat dari proyek-proyek tersebut dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lamadan maksimal.

#### **4. Partisipasi Dalam Evaluasi.**

Partisipasi dalam evaluasi yaitu tahap akhir dari pembangunan desa. Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam (Mulyadi, 2019), partisipasi dalam evaluasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian pada pelaksanaan hasil dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk kritik terhadap jalannya pembangunan, memberikan argumen maupun saran terhadap jalannya pembangunan, dan yang terpenting adalah memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk evaluasi.

Pada tahap ini keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pembangunan merupakan salah satu indikator yang digunakan penulis untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menilai pelaksanaan pembangunan atau akuntabilitas hasil pembangunan. Berdasarkan yang dijelaskan oleh ibu KR<sup>25th</sup> selaku sekretaris desa Donggala “...bahwa ada pelaporan hasil pembangunan yaitu berupa pelaporan bagian keuangan yaitu monitoring dan evaluasi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan dan dibantu oleh pemerintah desa. Adapun untuk pelaksanaan musyawarah desa tidak diadakan lagi khususnya evaluasi hasil pembangunan” (Wawancara). Kemudian dijelaskan oleh bapak SF<sup>53th</sup> selaku kepala dusun IV desa Donggala bahwa “.....Pelaporan monitoring dan evaluasi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) itu hanya dihadiri oleh para aparat desa saja, dan tidak ada lagi musyawarah desa dan jelas masyarakat tidak ada yang diundang...” (Wawancara). Sejalan dengan hal tersebut yang dijelaskan oleh bapak H<sup>55th</sup> selaku masyarakat dusun IV dan bapak I<sup>54th</sup> selaku masyarakat dusun II desa Donggala menyatakan bahwa “.....kami tidak pernah diundang untuk pelaporan seperti itu. Kami Hanya mengetahui bahwa laporan hasil pembangunan hanya disampaikan kepada inspektorat dan setelah itu tidak ada lagi musyawarah desa yang melibatkan masyarakat...” (Wawancara).

Dari wawancara tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa Donggala dilaksanakan ke pemerintah kecamatan dan desa serta pihak inspektorat, namun dalam hal pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam hal ini melalui musyawarah desa khusus mengenai hal tersebut, tidak pernah dilaksanakan atau masyarakat secara umum tidak pernah diundang atau dilibatkan.

Hal ini berbeda yang dijelaskan dalam penelitian Ngongare et al., (2019) dalam penelitiannya di desa Hatetabako, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pembangunan desa, termasuk dalam evaluasi hasil pembangunan. Keikutsertaan masyarakat penting untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan mereka, meningkatkan rasa memiliki, dan memperbaiki kualitas pembangunan lewat masukan dari masyarakat. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa di desa Hatetabako kecamatan Wasile Tengah kabupaten Halmahera Timur. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil pembangunan di Desa Donggala dapat dikatakan masing sangat kurang bahkan bisa dikatakan tidak ada.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa Donggala kecamatan Wolo kabupaten Kolaka dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa tersebut diawali dengan partisipasi dalam hal pengambilan keputusan kemudian masyarakat juga berpartisipasi tenaga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun dalam hal partisipasi dalam pemanfaatan khususnya ikut serta dalam merawat dan memelihara hasil pembangunan masih dinilai sangat kurang, begitupun dalam hal partisipasi dalam turut mengevaluasi hasil pembangunan, masyarakat desa Donggala tidak dilibatkan secara langsung.

## E. Referensi

- Arafat A. (2023). *Kebijakan Publik (Teori dan Praktik)*. Literasi Nusantara.
- Harahap K. Nurhayati, Arafat, I. H. (2024). *Buku Ajar, Metode Penelitian*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Ismanudin. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Terhadap Penggunaan Dana Desa*. 69–82.
- Ismatullah, I., & Mahendra, G. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 1–11.
- Mulyadi, M. (2019). *Buku Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Nadi Pustaka.
- Ngongare, A., Rompas, W. Y., & Kiyai, B. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5, 1–13.
- Renaldi, R. (2023). *Skripsi Oleh : Netrianni Sipahutar Fakultas Ilmu Sosial Dan Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Oleh : NETRIANNI SI.*
- Riyanti Samaun, Bala Bakri, A. R. M. (2022). *Jurnal ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi*. 1, 18–33.
- Safitri, H. N., Mallapiseng, A., & Baso, S. (2025). Efektivitas Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 323-333.
- Wijaya, M. S., Chusna, M. P., Hatchi, S. P., & Arafat, S. P. I. (2024). *Metode Campuran Dalam Penelitian Menggabungkan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. PT Media Penerbit Indonesia.